

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KODAM XVI/PTM DALAM PENCEGAHAN POTENSI KONFLIK DI WILAYAH MALUKU TAHUN 2015 S.D 2107

## IMPLEMENTATION OF THE POLICY OF KODAM XVI/PTM IN THE PREVENTION OF POTENTIAL CONFLICTS IN MALUKU REGION YEAR 2015 UNTIL 2107

Bambang Raditya<sup>1</sup>, Bambang Wahyudi<sup>2</sup>, Haposan Simatupang<sup>3</sup>  
Program Studi Strategi Pertahanan Darat Universitas Pertahanan  
(bambangraditya@outlook.com)

**Abstrak** -- Kodam XVI/PTM memahami bahwa konflik yang terjadi selama ini merupakan dampak dari plurarisme pada masyarakat Maluku yang sangat mudah untuk dibenturkan dan di pecah belah, terutama terhadap isu keagamaan dan kesukuan. Oleh karena itu Kodam XVI Pattimura melakukan pola pendekatan keamanan berbasis kesejahteraan masyarakat atau pendekatan pemberdayaan (*empowerment approach*) dalam menyelesaikan konflik di Ambon yang memprioritaskan pengkajian mengenai pelaksanaan implementasi kebijakan Kodam XVI/PTM dalam pencegahan potensi konflik di wilayah Maluku. Untuk menganalisis potensi konflik, kebijakan Kodam XVI/PTM dalam pencegahan potensi konflik serta implikasinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan reduksi data, display data dan kesimpulan data. Lokasi penelitian di Maluku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Potensi Konflik di wilayah Maluku terjadi karena kesenjangan ekonomi, karakter masyarakat yang temperamental, sifat kesukuan yang cukup kuat, tapal batas tanah serta kebiasaan masyarakat. 2) Kodam XVI/Pattimura menyikapi potensi konflik melalui pendekatan keamanan (*Security Approach*) dan pendekatan kesejahteraan (*Prosperity Approach*) yang seimbang. 3) Strategi yang dilakukan Kodam XVI/PTM dengan menggunakan sarana, alat dan kemampuan Kodam XVI/PTM, berkoordinasi secara aktif dengan instansi terkait dan mendorong partisipasi masyarakat.

**Kata kunci:** *implementasi kebijakan, potensi konflik, manajemen konflik*

**Abstract** -- Kodam XVI/PTM understand that conflicts occurred during this is the effect of plurarisme on the Maluku community that is very easy to dibenturkan and split asunder, especially against tribal and religious issues. Therefore Kodam XVI Pattimura do pattern based security approach to the well-being of society or the empowerment approach in resolving the conflict in Ambon. This research study regarding the implementation of priority policy implementation Kodam XVI/PTM in the prevention of potential conflict in the Maluku region. The purpose of this research was to menganalisis potential conflict of Territorial policy, XVI/PTM in the prevention of potential conflicts as well as its implications. This study uses qualitative methods. The data obtained through observation, interview and the study of librarianship. Data analysis techniques used for data reduction, display the data and the conclusions of the data. Location of research in Maluku. The results showed that: 1) potential conflict in the Maluku region occurs because the economic gap, the community character of the temperamental nature of

---

<sup>1</sup> Program Studi Strategi Pertahanan Darat, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan.

<sup>2</sup> Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan.

<sup>3</sup> Program Studi Strategi dan Kampanye Militer, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan.

ethnicity, which is quite strong, the land boundary and the habits of the society. 2 Kodam XVI/Pattimura) addressing potential conflict through security approach and welfare approach are balanced. 3) strategy conducted Kodam XVI/PTM by using the means, tools and capabilities of Kodam XVI/PTM, actively coordinate with relevant agencies and encourage public participation.

**Keywords: implementation of policy, potential conflicts, conflict management**

## Pendahuluan

**M**aluku merupakan salah satu provinsi yang sering terjadi konflik sosial, baik itu konflik yang bernuansa Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA), konflik agraria tentang tapal batas, konflik pengelolaan sumber daya alam, dan lain sebagainya. Konflik tersebut membawa dampak yang cukup besar karena terkait dengan berbagai kerugian baik secara material maupun non material dan dampak tersebut dirasakan langsung oleh masyarakat.

Maluku memiliki sejarah kelam berkaitan dengan konflik yang terjadi pada tahun 1999, peristiwa diawali tanggal 19 Januari 1999 yang mengawali kerusuhan lanjutan pada keesokan harinya terjadi di tempat yang berbeda dalam tempo yang hampir bersamaan. Peristiwa Ambon sebagai suatu rangkaian peristiwa dapat dilihat dari tiga tahapan sebagai berikut:

### Prakondisi

Pertentangan antar kelompok yang melibatkan sentimen agama sebagai isu berakibat pada meletusnya kerusuhan pada tanggal 19 hingga 23 Januari 1999.

Peristiwa yang memicu sebelum peristiwa kerusuhan bulan Januari ini terjadi. Yakni misalnya pertikaian yang terjadi pada tanggal 3 Maret 1995 antar warga desa Kelang Asaude dan warga desa Tumalehu, peristiwa serupa terjadi juga pada tanggal 21 Februari 1996.

### Peristiwa Kerusuhan Tanggal 19-23 Januari 1999

Kerusuhan dicetus (*triggering factor*) ditiga wilayah sekaligus: Simpang Tiga antara Batu Merah-Amantelu dan Galunggung, Jalan depan Gereja Silo dan daerah Rijali.

Kerusuhan tanggal 19 Januari terjadi begitu cepat dan menyebar dalam konsentrasi massa dalam jumlah yang cukup besar di beberapa tempat antara pukul 15.30-16.45 WITA.

Tanggal 20 Januari, berkembang isu masjid AL-Fatah terbakar. Hal itu berakibat reaksi massa dari Hila secara serentak berjalan menuju kota Ambon dan terseret ke dalam kerusuhan dan penyerangan.

### Kejanggalan-kejanggalan dalam Kerusuhan Ambon

Kerusakan total hampir terjadi di setiap sudut kota Ambon. Namun terlihat beberapa hal yang janggal: yakni, pada

saat kerusuhan terjadi telah dilakukan pemilihan sasaran perusakan maupun pembakaran. Hal ini terbukti dari adanya beberapa bangunan seperti Swalayan Matahari yang utuh tak tersentuh perusuh, sementara hampir seluruh bangunan disekelilingnya rusak total. Kejanggalan lain terdapat istilah yang tidak lazim digunakan di Ambon, seperti sebutan *nasrani* dan bukan *nasrani*, atau sebaran dengan bahasa Arab yang ditulis dengan tidak benar, grafiti yang ditinggalkan dalam aksi perusakan yang tidak lazim dan lain-lain.<sup>4</sup>

Konflik yang terjadi di Maluku hingga saat ini masih sering memunculkan kerusuhan yang mengakibatkan pengrusakan. Hal ini menunjukkan kecenderungan bahwa resolusi yang ada dan diterapkan tidak mampu memadamkan persoalan yang sebenarnya terjadi hingga pada tataran akar rumput permasalahan. Perubahan sosial yang terjadi masyarakat Maluku tidak mendapat intervensi dari Pemerintahan, namun murni dari kepentingan-masyarakat yang berujung pada terciptanya konflik psikologi, konflik emosional maupun kontak fisik antar

sesama individu ataupun kelompok masyarakat. Hal ini ditandai dengan sosialisasi nilai-nilai toleransi tidak berlangsung dengan baik yang bertumpang tindih dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Konflik Maluku merupakan sebuah peristiwa perubahan sosial yang begitu cepat tanpa dibarengi rekayasa sosial untuk merekatkan unsur-unsur masyarakat.

Berdasarkan beberapa kejadian di atas maka permasalahan yang ada di Maluku umumnya bersumber dari masalah kesenjangan sosial yang terjadi namun pada kenyataannya bisa berubah menjadi perkelahian menjurus kearah peperangan yang mengakibatkan korban jiwa. Di Maluku, terlihat jelas terdapat kompetisi antara dua kelompok yang berbeda, yaitu kaum mayoritas (yang tersirat sebagai kaum kuat) dan kaum minoritas (yang tersirat sebagai kaum lemah dan tidak dominan). Dulu, kelompok agama Kristen yang menduduki status kuat karena merupakan kelompok mayoritas dan memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi daripada kelompok minoritas, dalam hal ini kelompok masyarakat beragama Islam. Namun lambat laun

---

<sup>4</sup> Anonim, "Kerusuhan Ambon dan Poso (1999)", dalam <http://sejarah-kelam-indonesia.blogspot.co.id>.

komposisi masyarakat di Maluku berubah menjadi sebaliknya. Kelompok masyarakat beragama Islam yang awalnya menjadi kelompok minoritas, menjadi kelompok mayoritas. Kemudian kelompok ini mengejar ketertinggalannya dalam bidang pendidikan, sehingga dapat masuk pada sistem birokrasi Maluku. Status kelompok Islam pun berubah menjadi kelas yang lebih tinggi dari pada kelompok Kristen. Perubahan sosial ini sebetulnya lambat, namun karena belum adanya persiapan untuk menanganinya, akhirnya konflik sosial tersebut tumbuh juga.

Penyelesaian masalah yang tidak menyentuh ke akar konflik menjadi kunci terjadinya akumulasi masalah yang diakibatkan penumpukan dan pewarisan masalah. Sehingga masalah yang kecil dapat dibesar-besarkan dengan memainkan isu kesukuan atau etnik. Penanganan konflik, baik yang melibatkan TNI, Polisi, aparat pemerintah dan serta tokoh-tokoh yang ada di Maluku dirasa belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari gagalnya proses mediasi yang dilakukan sehingga mengakibatkan eskalasi konflik makin meluas. Variabel yang dipergunakan untuk mengurangi eskalasi konflik adalah dengan melakukan perjanjian yang melibatkan pihak ketiga, agar kelompok yang sebelumnya tidak

mau diajak perundingan kemudian mempertimbangkan pihak ketiga sebagai instrumen yang bisa menyelesaikan masalah bersama.

Kodam XVI/PTM memahami bahwa konflik yang terjadi selama ini merupakan dampak dari plurarisme pada masyarakat Maluku yang sangat mudah untuk dibenturkan dan di pecah belah, terutama terhadap isu keagamaan dan kesukuan. Dalam beberapa kejadian kemudian menjadi konflik yang sangat rumit yang penyelesaiannya cenderung berlarut-berlarut karena adanya ego dari suatu kelompok kepentingan, yang mendapatkan keuntungan dari adanya konflik.

Mengacu pada Undang-Undang No.7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI diatur dalam Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35, bahwa bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI untuk penghentian konflik dilaksanakan setelah adanya penetapan status keadaan konflik oleh pemerintah daerah atau pemerintah. Ditegaskan dalam PP ini, satuan TNI yang sedang menjalankan tugas bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI dalam status keadaan konflik tunduk pada ketentuan peraturan perundang-

undangan dan prinsip hak asasi manusia, dan tidak dapat diberikan tugas lain sampai dengan berakhirnya masa tugas.

Perbantuan TNI dalam menangani konflik yang ada di masyarakat merupakan bagian dari tugas TNI yang sudah diatur dalam Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagai bagian dari operasi militer selain perang. Pasal 7 Ayat 2 menyebutkan bahwa militer menjalankan tugas operasi militer selain perang dan salah satunya mengatasi aksi terorisme. Pelaksanaan tugas operasi militer selain perang itu baru bisa dilakukan jika sudah ada keputusan politik negara (Pasal 7 Ayat 3).<sup>5</sup>

Keterlibatan TNI dalam operasi selain perang, khususnya dalam menghadapi masalah keamanan dalam negeri, sifatnya hanyalah perbantuan, merupakan pilihan terakhir (*last resort*) setelah semua institusi keamanan yang ada tak bisa lagi mengatasi ancaman, bersifat sementara dan pelibatan itu harus didasarkan pada keputusan politik negara (*civilian supremacy*).

Salah satu penyebab terjadinya pergolakan dalam konflik yang berkepanjangan di Maluku, berakar dari

permasalahan kesenjangan sosial yang terjadi, sehingga berakibat munculnya berbagai tindakan-tindakan yang dapat mengancam keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika melihat lebih dekat pada permasalahan yang ada, tampaknya bahwa memang masalah yang dihadapi komunitas Maluku sejauh ini tidak sederhana, sehingga harus bersifat hati-hati dalam mengambil langkah dan menentukan strategi penanganan konflik yang sesuai dengan situasi di Maluku. Berbagai peristiwa konflik horizontal yang muncul berulang di Maluku sangat berpengaruh pada kehidupan sosial masyarakat hingga berdampak pada ketahanan wilayah setempat dan sulit untuk keluar dari siklus konflik kekerasan yang menjebak komunitas menuju kerjasama dan konsistensi damai di Maluku saat itu.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti merasa perlu untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai keterlibatan TNI dalam menangani permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat di Maluku sehingga dapat diketahui pemecahan terbaik mengenai upaya-upaya optimalisasi penanganan konflik

---

<sup>5</sup> Undang-Undang No.34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3.

sosial yang berkelanjutan dalam rangka menjaga keutuhan kedaulatan wilayah di Maluku pada masa mendatang dengan judul “Strategi Kebijakan Kodam XVI/PTM Dalam Pencegahan Potensi Konflik di Wilayah Maluku tahun 2015 s.d 2017”

Fokus pada penelitian ini adalah bagaimana strategi Kodam XVI/PTM dalam pencegahan potensi konflik di wilayah Maluku terutama berkaitan dengan program emas biru dan emas hijau. Fokus penelitian dijabarkan menjadi tiga sub fokus meliputi:

- Potensi konflik di Maluku dilihat dari aspek keterbatasan sumber, tujuan yang berbeda, komunikasi, karakteristik sosial, pribadi, kebutuhan, perasaan dan emosi serta budaya konflik dan kekerasan.
- Strategi Kodam XVI/PTM menghadapi konflik di Maluku yang diukur melalui aspek ukuran dan tujuan, sumber daya, karakteristik pelaksana, komunikasi pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang sedang terjadi.
- Implementasi Strategi Kodam XVI/PTM untuk pencegahan potensi konflik di Maluku.

### **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif.

Adapun subjek dalam penelitian ini terdiri dari pejabat Kodam XVI/PTM, Kesbangpol dan tokoh masyarakat yang mengetahui dengan baik keadaan Maluku. Adapun pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*.

Oleh karena itu dalam penelitian ini sampel sumber datanya adalah orang-orang yang berada pada posisi strategis penanganan potensi konflik sosial di wilayah Maluku terdiri dari Panglima Kodam XVI/PTM, Kasiter, Kasiops, Kasiintel Korem 151/Bny, Dandenintel Dam XVI/PTM dan Dandim 1504/Ambon.

### **Hasil Penelitian**

#### **Potensi Konflik di Wilayah Maluku**

Berdasarkan penuturan dari Bapak Kasdam XVI Ptm, Kasi Intel Korem 151/Binaiya Kodam XVI/Pattimura dan Ditintelkam, diketahui potensi konflik di Maluku bisa bersumber dari permasalahan perbedaan agama, ekonomi, kecemburuan sosial juga konstelasi politik yang sedang berlangsung yang dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk memicu suatu konflik agar tercapai tujuannya. Konflik terjadi lagi pada tanggal 11 September 2016, Ambon dilanda konflik yang mengakibatkan kerusuhan antar kelompok yang menewaskan tujuh orang dan

menghanguskan sekitar 200 rumah. Kerusakan tersebut di picu oleh tewasnya salah seorang warga karena kecelakaan ketika berkendara yang menabrak sebuah rumah. Namun kabar yang beredar warga tersebut dibunuh yang akhirnya memicu rasa dendam dan mengakibatkan dua kelompok bertikai dan akhirnya menyebar. Menurut data pihak kepolisian dan tim dokter mengatakan bahwa tewasnya warga tersebut murni karena kecelakaan, karena tidak terdapat bekas-bekas dari tindak kekerasan. Jika menilik dari kejadian tersebut potensi konflik di wilayah Maluku bisa berawal dari berbagai masalah namun ujung-ujungnya dihubungkan dengan masalah agama. Konflik agama bisa berlangsung lama dan sulit untuk dihentikan karena para pemeluknya berseteru atas nama ideologi keagamaan dan keyakinan.

Penyelesaian konflik Maluku tidak hanya menggunakan pendekatan keamanan semata. Pendekatan tersebut dinilai tidak cukup untuk menyikapi konflik sosial ekonomi yang terjadi. Paham pluralisme dalam masyarakat Maluku seringkali memunculkan berbagai konflik yang berujung pada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok etnik ataupun agama-agama tertentu, bahwa etnik dan agama hanyalah topeng

dari konflik. Pada kenyataannya konflik yang terjadi lebih berorientasi pada perebutan sumber daya yang ada baik itu ekonomi, sosial, politik, ataupun yang lainnya, sementara etnik dan agama menjadi media bagi upaya perebutan sumber-sumber tersebut. Dan tanpa disadari oleh masyarakat, akhirnya masyarakat secara tidak langsung sudah terlibat dalam konflik tersebut.

Sejauh ini kegiatan yang berkaitan dengan penanganan konflik masih bersifat parsial atau sendiri-sendiri sehingga tidak terjadi koordinasi yang baik padahal seharusnya jika program tiga pilar berjalan baik dari TNI (Babinsa), dari Polri (Babinkamtibmas), dengan unsur desa tentunya tidak menjadi masalah. Sehingga dapat dicari solusi untuk suatu potensi konflik atau permasalahan yang telah muncul.

Peranan Kodam XVI PTM dalam meminimalisir konflik yang terjadi selain melalui pendekatan kesejahteraan di bidang ekonomi, juga melakukan pendekatan budaya. Dengan pemahaman budaya dan tradisi serta kearifan lokal setempat berbagai kendala dan masalah separatisme dan isu-isu lainnya yang mengancam stabilitas bangsa dapat diminimalisir bahkan diantisipasi. Penanganan masalah dengan

menggunakan pendekatan kekeluargaan dan musyawarah termasuk penerapan kearifan lokal yang berlaku dalam masyarakat setempat cukup efektif dengan tetap tidak menyampingkan hukum yang berlaku jika sudah membahayakan kepentingan nasional. Harapannya melalui pendekatan tersebut, nilai-nilai dan norma yang berlaku, peran lembaga lokal serta tokoh masyarakat diaktualisasikan dalam penanganannya. Mengingat keanekaragaman bangsa Indonesia tersebut sangat rawan menimbulkan konflik horizontal.

### **Strategi Kodam XVI/PTM dalam pencegahan potensi konflik di wilayah Maluku**

Kodam XVI/Pattimura dalam menyikapi segala potensi konflik di Maluku tidak hanya dalam pengerahan pasukan ketika konflik terdeteksi atau konflik sedang berkecamuk, akan tetapi memikirkan dan mengambil langkah dengan mencari akar permasalahan, sehingga potensi konflik bisa terdeteksi. Dari hasil pendeteksian dilapangan dihipunklah suatu formula, bahwa permasalahan ekonomi menjadi faktor penting dalam memicu konflik di Maluku. Pada pelaksanaan tugasnya Kodam XVI/Pattimura melakukan serbuan territorial dengan mencermati kondisi

wilayah Maluku. Maka dari itu Kodam XVI/Pattimura mengambil kebijakan-kebijakan dalam mencegah potensi konflik di Maluku dengan memberdayakan potensi dalam bidang ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat Maluku itu sendiri. Dalam pelaksanaan OMSP (operasi militer selain perang) Kodam XVI/Pattimura terus meningkatkan sistem senjata sosial (Sissos) melalui pendekatan kesejahteraan (*Prosperity Approach*) dan pendekatan keamanan (*Security Approach*) yang seimbang.

Respon masyarakat ketika kebijakan Program Kodam XVI/Pattimura mulai dilaksanakan yaitu masyarakat sangat menyambut baik & mendukung upaya yang telah dilakukan Kodam XVI/Ptm dalam penanganan potensi konflik di Maluku. Bahkan masyarakat sudah mulai merasakan dampak positif dari Program-program tersebut, terutama Program Emas Biru dan Program Emas Hijau. Pengawasan yang dilakukan Kodam XVI/Ptm berkaitan kebijakan Program Kodam XVI/Ptm dengan melakukan pendataan dan melaporkan ke Komando Atas setiap ada kegiatan yang menonjol dan perkembangannya.



## **Implementasi strategi Kodam XVI/PTM dalam pencegahan potensi konflik di wilayah Maluku**

Berkat kerja keras dan kerja sama yang selama ini di prakarsai oleh pihak Kodam dalam penerapan Binter yang juga bersinergi dengan elemen lain membuah hasil yang positif dan signifikan jika dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Sinergitas antara TNI AD dan masyarakat, tokoh masyarakat dan juha tokoh agama yang sudah terjalin baik pada akhirnya membuah suatu hubungan saling menghargai dan memahami mengenai fungsi, hak dan kewajiban masing-masing, sehingga dengan sendirinya masyarakat menyadari sendiri bahwa kondisi damai dan pembangunan yang dibantu oleh pihak TNI AD dalam hal ini Kodam XVI/Pattimura, pihak pemerintah dan juga pihak lain sangat terasa hasilnya, bahkan beberapa daerah tetap meminta kepada pihak TNI untuk melakukan pendampingan dalam beberapa program yang sedang berjalan. Hal ini terbukti dengan kesadaran dari masyarakat untuk menyerahkan senjata-senjata yang dimiliki ketika konflik terjadi

yang diserahkan kepada pihak Kodam XVI/Pattimura.

## **Pembahasan**

### **Potensi Konflik di Wilayah Maluku**

Konflik merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan perkembangan manusia yang mempunyai karakteristik yang beragam. Manusia memiliki perbedaan jenis kelamin, strata sosial dan ekonomi, sistem hukum, bangsa, suku, agama, kepercayaan, serta budaya dan tujuan hidup yang berbeda, perbedaan inilah yang melatarbelakangi terjadinya konflik. Konflik adalah sebagai perbedaan persepsi mengenai kepentingan terjadi ketika tidak terlihat adanya alternatif. Selama masih ada perbedaan tersebut, konflik tidak dapat dihindari dan selalu akan terjadi. yang dapat memuaskan aspirasi kedua belah pihak.<sup>6</sup> Pada dasarnya munculnya konflik tidak bisa lepas dari kehidupan suatu masyarakat karena konflik merupakan fenomena yang tidak dapat dihilangkan dalam interaksi sosial. Konflik hanya dapat dikendalikan dan diminimalisasi sehingga konflik yang timbul tidak sampai stadium lanjut yang mengancam kehidupan bermasyarakat,

---

<sup>6</sup> Wirawan. Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi dan Penelitian, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 1-2.

berbangsa dan bernegara. Menurut Sarlito W. Sarwono dalam Rusdiana, menyebutkan bahwa konflik adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang dapat terjadi antarindividu, antar kelompok kecil, bahkan antarbangsa dan negara.<sup>7</sup> Konflik merupakan suatu masalah sosial yang timbul karena ada perbedaan pendapat maupun pandangan yang terjadi dalam masyarakat dan muncul akibat tidak adanya rasa toleransi dan saling mengerti kebutuhan masing-masing individu.

Dari berbagai pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa konflik adalah perpecahan, perselisihan dan pertentangan yang terjadi antar anggota atau masyarakat dengan tujuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan dengan cara saling menantang dengan ancaman kekerasan. Dalam bentuknya yang ekstrem, konflik itu dilangsungkan tidak hanya sekedar untuk mempertahankan hidup dan eksistensi, akan tetapi juga bertujuan sampai ketaraf pembinasan eksistensi orang atau kelompok lain yang dipandang sebagai lawan atau saingannya.

Potensi terjadinya konflik di Maluku sangat rentan disamping permasalahan

soal kesenjangan sosial, ekonomi, agama dan kepentingan politik juga dapat mudah timbul disebabkan oleh karakter masyarakat Maluku sendiri yang keras dan mudah tersinggung, sehingga permasalahan yang terjadi bisa menjadi sangat sensitif ketika pihak yang tidak bertanggung jawab merekayasa, memprovokasi dan memperparah suatu permasalahan yang terjadi. Faktor yang penting untuk dijadikan penangkal suatu potensi konflik adalah kesadaran masyarakat Maluku itu sendiri untuk dapat sabar, menelaah, dan berkomunikasi dengan pihak terkait mengenai suatu permasalahan. Sehingga tidak mudah terbakar dan melebar menjadi isu yang mengakibatkan bentrok antar kelompok. Kita semua yakin bahwa tidak ada agama mana pun yang mengajarkan kekerasan dan tidak ada suatu kelompok atau suku mana pun yang gemar bertikai, semua dikembalikan kepada pribadi masing-masing untuk dapat lebih sabar, bijaksana dan dewasa dalam menyikapi suatu permasalahan.

Setelah menelaah dan meneliti akibat dari timbulnya konflik di Maluku dibandingkan dengan kasus konflik di daerah lain di wilayah Indonesia memiliki

---

<sup>7</sup> Rusdiana, Manajemen Konflik, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 130.

beberapa kesamaan yaitu isu kesenjangan ekonomi dan isu agama yang dihembuskan. Namun untuk digaris bawahi tentang konflik di Maluku menjadi sangat besar, meluas dan sulit untuk diredam dikarenakan bercampurnya isu-isu yang berkembang dan juga pihak-pihak yang terlibat.

Beberapa hal yang menjadi faktor penyebab timbulnya konflik di Maluku, antara lain:

#### Kesenjangan ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor yang sering menjadi pemicu terjadinya suatu perselisihan dimana ketika adanya salah satu pihak yang merasa dirugikan akan cepat menyulut emosi, apalagi jika dibarengi dengan provokasi yang melibatkan banyak orang, sehingga akan mudah menjadi suatu peristiwa kerusuhan masa yang menyebar dan merusak, serta kurangnya koordinasi dan komunikasi antar tokoh masyarakat dan tokoh agama.

#### Karakter asli masyarakat Maluku yang keras

Sifat dan karakter manusia berpengaruh besar terhadap perilakunya dalam keseharian. Ini terbukti dari mudahnya terjadi konflik di Maluku yang bermula dari hal sepele menjadi besar dan meluas, dikarenakan karakter masyarakat Maluku yang keras dan gampang tersulut emosi. Maka dari itu kesadaran dan kesabaran

menjadi salah satu penentu dalam menyikapi suatu permasalahan di Maluku.

#### Isu kelompok separatis

Beberapa wilayah Indonesia masih terdapat kelompok-kelompok separatis yang terus berusaha untuk memisahkan diri dari NKRI. Salah satu kelompok tersebut tumbuh dan berkembang di wilayah Maluku yang merupakan hasil dari peninggalan ideologi pada masa kolonial Belanda. Kelompok separatis yang terdidikasi ada dan masih eksis di Maluku adalah RMS (Republik Maluku Selatan) yang sampai sekarang masih berusaha melepaskan diri dari NKRI.

#### Kurangnya sinergitas antar semua elemen

Dalam menyikapi suatu permasalahan diperlukan adanya komunikasi dan koordinasi yang cepat dan konsisten, dalam hal ini semua elemen yang berkepentingan diharapkan dapat bersinergi satu sama lain agar tercipta suatu kekompakan dalam menyelesaikan suatu masalah atau konflik.

#### **Kebijakan Kodam XVI/PTM Dalam Pencegahan Potensi Konflik**

Menurut Merilee S. Grindle mengatakan bahwa Implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan biasa

direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah dimana sarana-sarana tertentu telah dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan yang diinginkan.<sup>8</sup>

Implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam Wahab, mengatakan bahwa Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan focus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.<sup>9</sup>

George C. Edward III mencatat bahwa isu utama kebijakan publik adalah kurangnya perhatian kepada implementasi kebijakan publik. Dinyatakan dengan tegas bahwa tanpa implementasi yang efektif, keputusan

pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilakukan. Pada model implementasi George C. Edward III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel kritis sebagai faktor penentu keberhasilan suatu implementasi, yaitu; Komunikasi, Sumber daya, Disposisi (sikap kecenderungan), dan Struktur Birokrasi.<sup>10</sup>

Mazmanian dan Sabatier mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel:

- Variabel independen, yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman obyek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki.
- Variabel *intervening*, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis di antara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan

---

<sup>8</sup> Budi Winarno, Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus, (Yogyakarta: CAPS, 2012), hlm.149.

<sup>9</sup> Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke. Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 65.

<sup>10</sup> Irwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia, (Yogyakarta: Gava Media, 2012), hlm.58.

keterbukaan kepada pihak luar. Dan variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan risorsis dari konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, dan komitmen & kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

- Variabel dependen, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan, yaitu pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan obyek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut, dan akhirnya mengarah kepada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.<sup>11</sup>

Fokus dari Program Emas Biru adalah untuk menjaga keseimbangan antara prosperity dan security approach. Melalui program ini diharapkan masyarakat menjadi semakin rukun, kondisi kian aman dan sejahtera dan dapat mengurangi residu konflik serta sisa-sisa sapatisme di Maluku.

*Prosperity Approach* yang diusung oleh Kodam XVI/Pattimura merupakan perwujudan ketahanan ekonomi tercermin dalam kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang mampu memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis, menciptakan kemandirian ekonomi nasional yang berdaya saing tinggi, dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Dengan demikian, pembangunan ekonomi di Provinsi Maluku diarahkan pada mantapnya ketahanan ekonomi melalui iklim usaha yang sehat serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, tersedianya barang dan jasa, terpeliharanya fungsi lingkungan hidup serta meningkatnya daya saing dalam lingkup perekonomian global.

*Security approach* yang diusung oleh Kodam XVI/Pattimura merupakan perwujudan ketahanan keamanan tercermin dalam kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara (Hankamneg) yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil - hasilnya serta kemampuan

---

<sup>11</sup> Riant Nugraha D., Loc.cit., hlm. 169-170.

mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman.

Adapun yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program emas biru, emas hijau dan emas putih saat ini yaitu:

#### Infrastruktur

Di wilayah Maluku masih ada desa-desa yang terisolasi khususnya di pulau-pulau kecil. Hal ini disebabkan karena terbatasnya transportasi laut dan tingginya tingginya kerentanan pada perubahan cuaca laut. Hal ini berdampak pada kebutuhan hidup yang tinggi. Terbatasnya akses air bersih, listrik, dan telekomunikasi juga adalah bagian dari masalah infrastruktur di wilayah Maluku.

#### Perekonomian

Masih ditemukan rendahnya produktivitas, nilai tambah dan pendapatan karena terbatasnya benih atau bibit, terbatasnya pengetahuan dan keterampilan teknologi produksi, kurangnya tenaga penyuluh dan pendamping, rendahnya hilirisasi pengolahan produk unggulan, dan terbatasnya akses pasar. Masih adanya konflik sosial juga menjadi penyebab terjadinya masalah perekonomian.

#### Pendidikan dan Kesehatan

Masyarakat di pulau-pulau kecil wilayah Maluku masih rendah angka melek huruf dan partisipasi pendidikan dan angka

kematian ibu melahirkan dan anak serta gizi buruk masih tinggi. Hal tersebut terjadi karena terbatasnya dan tidak meratanya distribusi tenaga pendidikan dan kesehatan sekaligus terbatasnya akses menuju pusat pelayanan kesehatan dan pendidikan.

#### Regulasi dan Data Informasi

Hingga saat ini belum adanya kesepakatan berupa sinergitas antara Pemerintah, pelaku usaha, akademisi dan masyarakat untuk melakukan pengendalian dan evaluasi secara lebih spesifik disesuaikan dengan kepentingan instansi yang ada di Maluku berkaitan dengan Program Emas Biru. Sehingga keberlanjutan program Emas Biru dikhawatirkan tidak akan berumur panjang. Pemerintah selaku pemegang regulasi dan kebijakan masih belum melakukan tindak lanjut nyata yang membawa perubahan signifikan terhadap perubahan pemberdayaan masyarakat.

#### Isu yang berkaitan dengan RMS

Perlu adanya tindakan tegas dalam meredam dan menghilangkan isu RMS di Maluku, karena dapat memunculkan kembali ketakutan dan kecemasan masyarakat Maluku.

## **Strategi Kodam XVI/PTM Dalam Pencegahan Potensi Konflik**

Strategi adalah tindakan yang bersifat senantiasa meningkat (*Incremental*) dan terus menerus serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan dimasa depan.<sup>12</sup> Selanjutnya Argyris (1985), Mintzberg (1979), Steiner dan Miner (1977), yang dikutip Freddy Rangkuti memberikan pengertian mengenai strategi yaitu Strategi merupakan respon secara terus-menerus maupun adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi organisasi.

Menurut Stephanie K. Marrus dalam buku Husein Umar, strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.<sup>13</sup> Pernyataan strategi secara eksplisit merupakan kunci keberhasilan dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Strategi memberikan kesatuan arah bagi semua anggota organisasi. Bila

konsep strategi tidak jelas, maka keputusan yang diambil akan bersifat subyektif atau berdasarkan intuisi belaka dan mengabaikan keputusan yang lain.

Kodam XVI/Pattimura dalam mengemban tugas di wilayah Maluku melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan pembinaan territorial (Binter). Dalam penerapan metode Binter di wilayah tugas setiap personel TNI AD menjalankannya dengan:

### *Komunikasi Sosial (Komsos)*

Metode komunikasi sosial di wilayah binaan dirasa cukup ampuh dan tepat untuk mendeteksi dan mengetahui setiap permasalahan atau kendala yang terjadi di lingkungan masyarakat.

### *Bhakti TNI*

Bukti nyata dari metode ini adalah karya bhakti yang dilaksanakan Kodam XVI/Pattimura, baik dari satuan Kodim, Korem, juga Koramil bersama dengan masyarakat dalam membersihkan lingkungan, membangun sarana dan prasarana umum, (seperti pembangunan jalan, rumah ibadah) pembagian sembako, pengobatan massal, dan kegiatan lainnya yang berguna untuk kesejahteraan masyarakat dan mempercepat

---

<sup>12</sup> Husein Umar, Strategi Manajemen in Action, (Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm.1.

<sup>13</sup> Freddy Rangkuti. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2009)., hlm. 3.

pembangunan di wilayah Maluku. Hal ini tentu juga mambantu program pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

### Bintahwil

Program Bintahwil sangat diperlukan untuk dilaksanakan dan berkelanjutan karena dengan terbentuknya ketahanan wilayah baik dalam bentuk ekonomi atau pun ideologi menjadi modal besar untuk menangkis segala bentuk pengaruh buruk, isu-isu yang menyesatkan (*Hoax*), juga pengaruh untuk pemisahan wilayah dari NKRI.

### **Kesimpulan dan Rekomendasi**

Berdasarkan pembahasan pada kajian penelitian ini, maka dapat disusun kesimpulan sebagai berikut:

Potensi Konflik di wilayah Maluku sering terjadi biasanya karena kesenjangan ekonomi, karakter masyarakat yang temperamental, sifat kesukuan yang cukup kuat, tapal batas tanah serta kebiasaan masyarakat yang masih suka minuman keras lokal. Sejauh ini kegiatan yang berkaitan dengan penanganan konflik masih bersifat parsial atau sendiri-sendiri sehingga tidak terjadi koordinasi yang baik. Potensi internal Kodam XVI/Pattimura dalam penanganan potensi konflik yaitu seluruh satjar dan

staf Kodam XVI/Ptm memiliki *job description* masing-masing yang semuanya bermuara kepada terjaganya kedaulatan NKRI yang utuh, termasuk di wilayah Maluku. Potensi eksternal Kodam XVI/Pattimura dalam penanganan potensi konflik yaitu berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk melaksanakan mediasi terhadap daerah yang bertikai dengan mengumpulkan para Tomas, Toga dan Todat.

Kodam XVI/Pattimura dalam menyikapi segala potensi konflik dilakukan melalui pendekatan keamanan (*Security Approach*) dan pendekatan kesejahteraan (*Prosperity Approach*) yang seimbang. Peningkatan kesejahteraan yang diberi nama Program Emas biru, Emas Hijau dan Emas Putih. Sedangkan kendala yang ditemui berupa:

- a. Kendala internal meliputi keterbatasan alkap, fasilitas & anggaran serta keterbatasan sumber daya manusia yang professional.
- b. Kendala eksternal meliputi jalur koordinasi/birokrasi yang panjang, faktor kebiasaan dan tingkat kecerdasan/daya pikir masyarakat yang masih rendah serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk hidup disiplin, tertib dan mencintai lingkungan.



Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam meredam potensi konflik di Maluku yaitu dengan menggunakan sarana, alat dan kemampuan Kodam XVI/PTM, Kodam XVI/PTM berkoordinasi secara aktif dengan instansi terkait dengan prioritas dukungan dan partisipasi mereka di masa yang akan datang dan mendorong partisipasi masyarakat dalam rangka menumbuhkan partisipasi aktif dalam bidang pembangunan yang berkelanjutan.

### **Rekomendasi**

Selanjutnya, Penulis menyusun rekomendasi sebagai berikut:

- a. Memunculkan kembali kearifan lokal seperti *pela gandong* yang jika dijabarkan, *pela* adalah hubungan karena balas budi dan *gandong* adalah hubungan darah.
- b. Sangat diperlukan dijaganya harmonisasi antara TNI dalam hal ini Kodam XVI/Pattimura dan jajarannya agar apa yang telah dicapai dan dinilai berhasil selama ini dapat terus terjaga dan terjalin secara berkesinambungan.
- c. Aparat teritorial terus melaksanakan tugas sesuai prosedur yang diberikan, bahkan jika bisa ditingkatkan dengan pengetahuan lain yang dimilikinya sehingga imbasnya masyarakat akan

merasa terbantu dengan keberadaan aparat teritorial.

- d. Memotivasi daerah-daerah yang ada di pelosok Maluku dengan kondisi geografis tidak memiliki sumber daya alam yang berpotensi untuk dikembangkan untuk mendapatkan bantuan pemerintah untuk memberdayakan dan meningkatkan kualitas keberadaannya dengan melalui program Revitalisasi Desa Adat.

### **Daftar Pustaka**

- Antonius, dkk. 2012. *Empowerment, Stress dan Konflik*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bryson, John M. 2001. *Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial* (terjemahan M. Miftahuddin). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djuhandar. Erom. 2005. *Sosiologi Politik*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Dwidjowijoto, Riant Nugraha. 2004. *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi)*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Hunt, M.P. and Metcalf, L. 1996. *Ratio and Inquiry on Society's Closed Areas dalam Educating the Democratic Mind* (Parker, W.). New York: State University of New York Press.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto. 2013. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Mutiarin, Dyah dan Arif Zaenudin. 2014. Manajemen Birokrasi dan Kebijakan; Penelusuran Konsep dan Teori). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Purwanto, Irwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media.
- Rangkuti, Fr.eddy. 2009. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rusdiana. 2015. Manajemen Konflik. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Scannell, Mary. 2010. The Big Book of Conflict Resolution Games. (United States of America: McGraw – Hill Companies, Inc.
- Setiadi, Elly M. dan Usman Kolip. 2011. Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Salusu, J. 2003. Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit. Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Susanto, Astrid. 2006. Pengantar Sosiologi Dan Perubahan Sosial. Bandung: Bina Cipta.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Alfabeta.  
2017. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabeta.
- Supardi. 2013. Aplikasi Statistika dalam Penelitian. Jakarta: Prima Ufuk Semesta.
- Suryana. 2006. Kewirausahaan. Jakarta: PT Salemba Empat.
- Umar, Hu.sein. 2003. Strategi Manajemen in Action. Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke. Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara.